

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH  
DAERAH DAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2012**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RIZAL QOWI**

**NIM 12030114183020**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rizal Qowi

Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183020

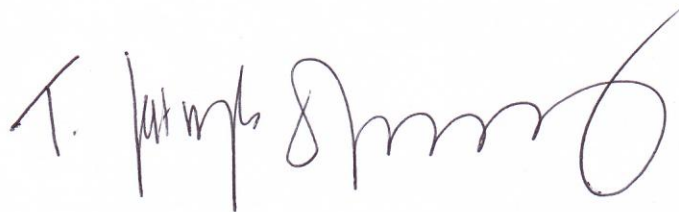
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH  
DAERAH DAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN  
ANGGARAN 2012

Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si, Ph.D., Akt

Semarang, 7 September 2016

Dosen Pembimbing



Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si, Ph.D., Akt

NIP 1971102620000310001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rizal Qowi

Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183020

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : PENGARUH KARAKTERISTIK  
PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN  
PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN  
ANGGARAN 2012

Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si,  
Ph.D., Akt

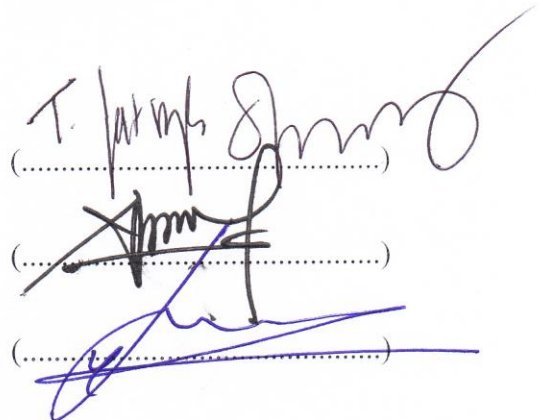
**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 September 2016**

Tim Penguji

1. Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Ph.D., Akt.

2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

3. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D.



(.....)

(.....)

(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Rizal Qowi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 September 2016

Yang membuat pernyataan



Rizal Qowi

NIM 12030114183020

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggaran 2012. Kinerja pemerintah daerah diukur berdasarkan skor dalam Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang diperingkatkan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012. Total sampel penelitian ini adalah 477 pemerintah daerah, terdiri dari 384 kabupaten dan 93 kota. Metode penarikan sampel adalah dengan *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kata kunci: kinerja pemerintah daerah, karakteristik pemerintah daerah, laporan kinerja pemerintah daerah, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), temuan pemeriksaan BPK.

## **ABSTRACT**

*This study aims to prove that the level of wealth, dependence to the central government, capital expenditure of local government, and the audit finding of BPK, are influential for performance of local governments of Indonesia in 2012 . The performance is measured by scores in the EPPD's evaluation report that arranged nationally by Ministry of Home Affairs.*

*Population of this research is whole of Indonesia's local governments in 2012. Total of samples are 477 local governments that consist of 384 regencies and 93 cities. This research uses purposive sampling method and SPSS 21 software as the analysis program.*

*The result shows that the level of wealth of local government has positif effect for it's performance, but the level of dependence to the central government, the level of capital expenditure, and the audit finding of BPK have negatif effect for it's performance.*

*Keywords: local government's performance, local government's characteristics, local government performance report, EKPPD, LPPD, audit finding of BPK.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012”, dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Ibu Aditya Setiani, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali.
3. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si, Ph.D., Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan penyusunan skripsi.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
5. *Emak Bapak*, mertua, kakak-kakak serta adik-adik tercinta.

6. Nur Fauziah, isteri tercinta. Terima kasih atas cinta, semangat, doa, dan motivasi yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi terselesaikan.
7. Zainab Izzaty Dzakiyyah, puteri pertama kami, proses tumbuh kembangnya selalu menjadi penyegar ide dan suasana dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan-kawan Kelas Kerjasama BPK tahun 2014, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Skripsi yang kami susun ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik dapat disampaikan sehingga menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi yang membaca ataupun pihak yang memerlukannya.

Semarang, 7 September 2016

Penulis



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 4.1 Proses Pengambilan Sampel Akhir .....	45
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas .....	47
Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser .....	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov .....	49
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi.....	50
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji t .....	52
Tabel 4.9 Koefisien Regresi .....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Hasil Output Analisis Regresi .....	66
Lampiran B Daftar Pemerintah Daerah Sampel Penelitian.....	69



2.1.1.3 Pengertian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	17
2.1.1.4 Pengertian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	27
2.1.1.5 Pengertian Karakteristik Pemerintah Daerah .....	18
2.1.1.6 Pengertian Temuan Pemeriksaan BPK .....	21
2.1.2 Penelitian Terdahulu .....	22
2.2 Kerangka Pemikiran .....	27
2.3 Hipotesis Penelitian.....	29
2.3.1 Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .....	29
2.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota .....	30
2.3.3 Pengaruh Belanja Modal Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	31
2.3.4 Pengaruh Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	35
3.1.1 Variabel Dependen .....	35
3.1.2 Variabel Independen .....	35
3.1.2.1 Variabel Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah .....	36
3.1.2.2 Variabel Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat.....	37
3.1.2.3 Variabel Belanja Modal .....	38
3.1.2.3 Variabel Temuan Pemeriksaan BPK.....	39
3.2 Populasi dan Sampel .....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	40
3.5 Metode Analisis.....	40
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	41
3.5.2 Regresi Linear Berganda .....	41

3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	42
3.5.2.1.1 Uji Multikolinearitas .....	42
3.5.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas .....	42
3.5.2.1.3 Uji Normalitas .....	43
3.5.2.2 Uji Kelayakan Model ( <i>Goodness of Fit Model</i> ).....	43
3.5.2.2.1 Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	43
3.5.2.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	44
3.5.2.2.3 Uji Signifikansi Paramater Individual (Uji Statistik t).....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	45
4.2 Analisis Data .....	46
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	46
4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	47
4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	47
4.2.2.1.1 Uji Multikolinearitas .....	47
4.2.2.1.2 Uji Heteroskedastiditas .....	48
4.2.2.1.3 Uji Normalitas .....	48
4.2.2.2 Uji Kelayakan Model ( <i>Goodness of Fit Model</i> ).....	49
4.2.2.2.1 Koefisien Determinasi .....	50
4.2.2.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	50
4.2.2.2.3 Uji Signifikansi Paramater Individual (Uji Statistik t).....	51
4.3 Interpretasi Hasil .....	53
4.3.1 Pengaruh Tingkat Kekayaan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota .....	53
4.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota .....	54
4.3.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota .....	55

4.3.4 Pengaruh Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .....	56
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Keterbatasan .....	60
5.3 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
Lampiran A .....	66
Lampiran B.....	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan secara fundamental sejak diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22/1999 tentang “Pemerintahan Daerah” yang diubah dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang “Pemerintahan Daerah” yang diubah lagi dengan Undang-Undang No. 23/2014 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah” yang diubah dengan Undang-Undang No. 33/2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah”. Menurut Adi (2006) kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia belum menunjukkan hasil yang baik meskipun sudah dijalankan lebih dari satu dekade,. Menurut Jaweng (2014) secara umum desain kebijakan dan praktik (kinerja) pemerintahan daerah kita sejauh ini belum mampu membuktikan desentralisasi sebagai jalan membangun Indonesia dari daerah. Terdapat ketidakseimbangan antara kapasitas lokal yang belum terbangun kuat dibandingkan dengan otoritas yang diberikan kepada pemerintah daerah yang begitu besar. Selain itu sisi akuntabilitas masih lemah, dan kontrol pusat atas daerah belum berjalan efektif.



Padahal menurut Curristine dkk (2007) desentralisasi merupakan salah satu dari tiga faktor institusional yang dapat meningkatkan kinerja lembaga sektor publik, sehingga seharusnya pemerintah daerah di Indonesia juga dapat meningkatkan kinerjanya seiring dengan lamanya penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini.

Pengendalian atau kontrol dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam rangka menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Pengendalian atau kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah salah satunya diwujudkan dalam bentuk evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang dimaksud adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 3/2007 tentang “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat”, serta Peraturan Pemerintah No. 6/2008 tentang “Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Kedua peraturan ini merupakan dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2008 tentang “Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” disebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73/2009 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” untuk melengkapi Peraturan Pemerintah No. 6/2008 tentang “Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini menyebutkan bahwa EKPPD menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama. Pada akhir proses dari EKPPD akan dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai gambaran sejauh mana kinerja penyelenggaraan daerah mereka masing-masing.

Selain evaluasi dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, upaya perbaikan kinerja pemerintah daerah juga dilakukan dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan asas *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam bidang keuangan. Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas keuangan ini diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang “Keuangan Negara” pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “*Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa*

*laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.*

Penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah sudah beberapa kali dilakukan. Mustikarini dan Fitriyasi (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah, yang dijabarkan dengan variabel ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja daerah, dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun anggaran 2007. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemerintah daerah dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif, sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penelitian lain dilakukan oleh Sudarsana (2013) yang meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah pada tahun 2010, dengan menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja modal sebagai penjabaran dari karakteristik daerah. Dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa ukuran daerah, ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusmin dkk (2014) yang meneliti tentang pengaruh karakteristik demografis pemerintah daerah di Indonesia terhadap kondisi atau kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik demografis pemerintah daerah yang digunakan adalah luas wilayah, lokasi, tenur, gender, indeks pembangunan manusia, dan ukuran pemerintah daerah. Rusmin dkk (2014) menemukan bahwa luas wilayah dan lokasi suatu pemerintah daerah dapat menjelaskan variabel kondisi keuangan pemerintah daerah serta pemerintah daerah di Jawa relatif lebih baik dalam hal pelaporan keuangan dibandingkan pemerintah daerah yang berada di pulau lain. Hasil penelitian Rusmin dkk (2014) juga menemukan bahwa pemerintah daerah dengan populasi perempuan yang lebih besar dan indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi akan cenderung lebih baik dalam mendanai kegiatan pelayanan umum mereka dan juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Selain itu juga ditemukan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangannya, semakin kuat kemampuan mendanai pelayanan publik, dan semakin besar juga kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya penelitian Nurdin (2015) yang meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK RI terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dimana digunakan skor kinerja dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2012, menemukan kesimpulan bahwa: tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota; tingkat

ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota; tingkat belanja daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota; temuan BPK RI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, peneliti bermaksud mengkonfirmasi kembali hubungan antara karakteristik pemerintah daerah dan temuan pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan data peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2012, yang merupakan data terbaru yang tersedia di *website* Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini juga menggunakan variabel karakteristik pemerintah daerah yang lebih sederhana dan relevan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana variabel-variabel tersebut adalah: tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan tingkat belanja modal daerah. Lebih lanjut penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan Mustikarini dan Fitriyani (2012) mengenai variabel belanja modal, apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mustikarini dan Fitriyani (2012) menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan jumlah beragam, salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Rusmin dkk (2014) menyatakan bahwa penerimaan PAD yang semakin meningkat akan meningkatkan kemampuan untuk membiayai layanan masyarakat yang diberikan

pemerintah daerah. Apabila dilihat dari tingkat kemandirian pemerintah daerah, PAD merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah (Hartoyo, 2014).

Setiap pemerintah daerah juga mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang besarnya beragam tergantung kondisi masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang masih mengandalkan DAU dari pemerintah pusat menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut belum dapat mengoptimalkan kewenangan desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat. Gadenne dan Singhal (2014) menyatakan bahwa pemerintah daerah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan dari eksternal seperti transfer dari pemerintah pusat, dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Tingginya ketergantungan pada DAU menandakan pemerintah daerah belum optimal dalam menciptakan kebijakan atau program/kegiatan guna memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di wilayahnya untuk kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah pula kinerja pemerintah daerah.

Selain dari sisi pendapatan, karakteristik pemerintah daerah bisa juga dilihat dari sisi belanja pemerintah daerah, yang besarnya juga beragam disesuaikan dengan besarnya pendapatan yang dimilikinya. Salah satu jenis belanja daerah adalah belanja modal. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal merupakan item-item yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimana salah satu hasil dari pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan. Semakin banyak temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah, yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD, tersebut kurang baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakah tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?

3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?
4. Apakah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggaran 2012.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah.



### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian.